



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi

Rizka Ramadani ¹⁾; Erika Revida MS.²⁾

¹⁾ Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

²⁾ Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: ¹⁾ rizkarr22@gmail.com ; ²⁾ erikarevida@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [15 Desember 2022]

KEYWORDS

Empowerment, Joint Business Group (KUBE)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan yang terus menerus bertambah dari hari kehari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan salah satu bentuk upaya penanggulangan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) salah satunya dilakukan dengan membentuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sebagai teknik keabsahan data. Penelitian ini dilandaskan oleh indikator pemberdayaan menurut Edi Suharto yang mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui pemungkinan (enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting), dan pendukung (supporting). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi dapat dikatakan masih belum berjalan secara optimal.

ABSTRACT

The problem of social welfare, especially poverty which continues to increase from day to day, the Indonesian government through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia issued a form of mitigation effort through community empowerment in the development of Productive Economic Enterprises (UEP). This study aims to identify and analyze community empowerment through the joint business group (KUBE) program to reduce poverty in Bandar Utama Village by the Tebing Tinggi City Social Service. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The data obtained was then analyzed using triangulation as a data validation technique. This research is based on empowerment indicators according to Edi Suharto who argues that community empowerment can be achieved through enabling, empowering, protecting, and supporting. Based on the research results, it can be seen that community empowerment through the Joint Business Group (KUBE) program to tackle poverty in the Bandar Utama Village, Tebing Tinggi City, can be said to be still not running optimally.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang kemiskinan berarti berbicara tentang harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara sebagai suatu proses, dimana kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Kemiskinan merupakan topik yang sangat penting dan krusial. Setiap Negara pasti memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali Negara Indonesia. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

Masalah kemiskinan dalam konteks masyarakat Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Masalah kemiskinan menjadi penyebab utama dari adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di antara masyarakat Indonesia dan merupakan fakta yang sudah sangat tua. Masyarakat miskin pada dasarnya memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Oleh karena itu berdasarkan pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek, maka pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk program-program bantuan sosial. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun dengan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah.

Meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus menerus bertambah dari hari kehari maka pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan salah satu bentuk upaya penanggungan melalui program pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) salah satunya dilakukan dengan membentuk program Kelompok Usaha Bersama

(KUBE). Kelompok Usaha Bersama adalah program penanggulangan kemiskinan yang dilandasi suatu pertimbangan atas kenyataan adanya keterbatasan yang melekat pada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarga miskin, seperti rendahnya sumber daya manusia, kurangnya modal usaha dan keterbatasan kemampuan dalam menjalin jaringan pemasaran.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu program yang dicanangkan pemerintah dan lembaga non pemerintah yang memfokuskan dalam peminjaman modal tanpa bunga untuk meningkatkan usaha kecil yang dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta membantu suaminya untuk dapat meningkatkan jumlah penghasilan keluarganya. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya untuk dapat menekan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan yang bisa dijalankan oleh anggota keluarga miskin (Kemensos RI, 2017).

Adapun sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah setiap provinsi/kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Salah satu yang menjadi sasaran dilaksanakannya program pemberdayaan pengentasan kemiskinan KUBE adalah Provinsi Sumatera Utara tepatnya Kota Tebing Tinggi.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	16.64	10,27
2019	16.30	9,94
2020	16.32	9,65
2021	17.37	10,30

Sumber: BPS Kota Tebing Tinggi 2021

Berdasarkan Data BPS tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kota Tebing Tinggi menunjukkan sebanyak 16.64 ribu jiwa dengan tingkat persentase penduduk miskin sebesar 10,27%. Tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah penduduk miskin 16.30 ribu jiwa dengan tingkat persentase sebesar 9,85%, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk miskin 16.32 ribu jiwa dengan tingkat persentase sebesar 9,94%. Sementara pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk miskin 17.37 ribu jiwa dengan tingkat persentase sebesar 10,30%.

Adapun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Tebing Tinggi berjumlah 12 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Tebing Tinggi dengan berbagai jenis usaha diantaranya dalam bentuk E-Warung KUBE dan KUBE jasa dengan memperjualbelikan sembako dan keperluan rumah tangga (Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, 2021).



Tabel 1 Jumlah E-Warung KUBE

No.	Nama E-Warung KUBE	Alamat Penyaluran
1.	Abdi Sejahtera	Jl Bukit Bundar Lk. III Kel. Lalang Kec. Rambutan
2.	Maju Bersama	Jl Yos Sudarso Gg. Famili Lk. III Kel. Tj Marulak Kec. Rambutan
3.	Jaya	Jl Koperasi Lk. IV Kel. Karya Jaya
4.	Rambung Abadi Jaya	Jl D.I Panjaitan Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota
5.	Makmur Utama	Jl Pala Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota
6.	Durian Berkah	Jl Sei Suka Lk. IV Kel. Durian Kec. Bajenis
7.	Bropika	Jl Setia Budi Lk. II Kel. Berohol Kec. Bajenis
8.	Murah Rezeki	Jl KF. Tandean Lk. V Kel. Bulian
9.	Raymond Bersama	Jl Gatot Subroto Lk. I Kel. Tualang Kec. Padang Hulu
10.	Lubuk Barus Sejahtera	Jl Gator Subroto Lk. I Lubuk Raya Kec. Padang Hulu.
11.	Bagelen Jaya Abadi	Jl. Abdul Hamid Lk. IV Kel. Bagelen
12.	Tambangan Jaya Bersama	Jl Aluminium Lk. I Kel. Tambangan Kec. Padang Hilir

Sumber: Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, 2021.

Kelurahan Bandar Utama merupakan salah satu dari beberapa daerah yang terdaftar menerima bantu vuan Program Kelompok usaha Bersama (KUBE). Kelurahan Bandar Utama merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Kelurahan Bandar Utama merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dengan luas administratif 0,98km². Kelurahan Bandar Utama terdiri dari 5 Lingkungan. Dalam lingkup Kelurahan jumlah penduduk yaitu 5.368 jiwa, jumlah KK miskin 920KK dan jumlah penduduk miskin 2.923 jiwa.

Kondisi masyarakat di Kelurahan ini masih tergolong kurang mampu, sebagian dari warga Kelurahan Bandar Utama bermata pencaharian sebagai tukang becak, tukang cuci, dan buruh, dan bahkan masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan harian penduduk, dan belum bisa membantu untuk biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Dengan menyadari kondisi penduduk tersebut diharapkan program Kelompok Usaha Bersama dapat membantu masyarakat penerima bantuan di daerah ini dalam memperbaiki akses di berbagai bidang.

Berdasarkan hasil pra penelitian lapangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui KUBE untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama masih ditemukan adanya berbagai masalah, yakni kurangnya motivasi masyarakat dalam mengikuti program KUBE dikarenakan minimnya sosialisasi, kemampuan dan keterampilan anggota kelompok dalam hal manajerial kelompok masih terbatas, latar belakang pendidikan yang rendah, pengalaman dalam pengorganisasian kelompok terbatas, dan masih adanya masyarakat miskin yang tidak komitmen terhadap kewajibannya, sementara hak mereka sudah mereka dapatkan dengan menerima bantuan senilai Rp. 30.000.00 per KUBE. Masyarakat juga masih mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi persyaratan program KUBE, seperti kurangnya tanggapan yang baik dari pegawai.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Dye (dalam Anggara 2014: 35), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Pengertian lain dikemukakan oleh Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Dari pengertian kebijakan publik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan istilah pelayanan publik ialah serangkaian tindakan yang tidak dilakukan atau yang dilakukan oleh pemerintah dimana berorientasi pada tujuan tertentu guna untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2005:60), pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses artinya, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Menurut Suharto (2005:93-97) Indikator pemberdayaan berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat yakni: pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*).

Kemiskinan

Menurut Suharto (2010:134), kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang. Secara luas, kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai serba kekurangan, seperti: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari pendekatan kebutuhan dasar, kemiskinan atau lebih tepatnya fakir miskin, dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak sesuai standar kemanusiaan, berupa makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Todaro (dalam Edy, 2017:5) menyatakan absolut mengacu kepada semua penduduk yang hidup dibawah "garis kemiskinan internasional" atau yang kurang dari pendapatan minimum tertetu. Sedangkan istilah miskin menurut Thoir (dalam Edy, 2017:6) adalah kondisi yang secara umum menggambarkan suatu rumah tangga, komunitas, atau seseorang yang berda dalam kekurangan, terutama kaitannya dengan pemenuhan yang paling dasar.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu fenomena atau kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Ukuran Kemiskinan

Menurut Ravallion (dalam Sungkowo Edy, 2017:9) ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma-norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek penelitian dan latar soal penelitian. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan berbentuk cerita mendetail (deskripsi-rinci, gambaran yang mendalam), termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian (Hamidi. 2005:3). Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realita dari masalah dengan menggunakan data-data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di di Kantor Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi karena Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi merupakan implementor dari kebijakan tersebut dan telah melaksanakan program kelompok usaha bersama (KUBE), beralamatkan di Jl. Gunung Leuser, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan penulis ialah Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Lurah Bandar



Utama Kota TEbing Tinggi, Tim pendamping KUBE dan Masyarakat yang terlibat dan menjadi anggota KUBE, Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data dengan teknik analisis yang dilakukan secara interaktif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses artinya, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005:60). Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ditinjau berdasarkan indikator-indikator menurut Suharto 2005 yakni: pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*).

Pemungkinan (*enabling*)

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat dari Suharto (2005:93) yakni, pemungkinan atau *enabling* adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemungkinan itu sendiri merupakan salah satu fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Dimana pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pemungkinan merupakan bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk memungkinkan masyarakat berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan serta hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa indikator pemungkinan (*enabling*) yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk menanggulangi kemiskinan sudah berjalan dengan baik dan efektif, tentunya proses pemberdayaan yang dilakukan harus secara bottom up dimana dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan lingkungan masyarakat tersebut. Dimana Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi sudah memberikan bentuk motivasi dan dukungan atas kemauan masyarakat itu sendiri sehingga kecil kemungkinan tidak menjalankan saran dan masukan yang diberikan melalui pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Motivasi yang diberikan Dinas Sosial terkait pemberdayaan itu sendiri berupa sosialisasi pemahaman terkait Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam bentuk edukasi atau pembelajaran. Dan juga memberikan bantuan modal usaha yang nantinya akan diolah oleh masyarakat dalam bentuk usaha bersama. Modal usaha yang diberikan pemerintah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar Rp. 30.000.000-.,.

Penguatan (*empowering*)

Penguatan atau *empowering* adalah suatu kegiatan memperkuat pemahaman mengenai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap masalah yang dihadapinya. Penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat agar harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. Oleh sebab itu dalam suatu penguatan dibutuhkan pelatihan maupun pembelajaran dalam melaksanakan proses pemberdayaan. Dimana pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direksi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.

Hasil pengamatan peneliti dalam pelaksanaan penguatan (*empowering*) dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum cukup berjalan dengan baik. Dimana pelatihan yang hanya melibatkan Ketua KUBE saja, berarti Ketua itulah yang bertanggungjawab untuk memberikan pemahaman kepada anggota mereka masing-masing. Hal itu dinilai menjadi salah satu faktor tidak semua anggota KUBE mahir dalam menjalankan tugas mereka di dalam kelompok tersebut. Titik lemah dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut harus dilakukannya perbaikan oleh Dinas Sosial agar upaya mewujudkan kemandirian terhadap masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Perlindungan (*protecting*)

Perlindungan atau *protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan (*protecting*) dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak berjalan dengan optimal dikarenakan perlindungan yang diberikan hanyalah perlindungan dimata hukum saja. Namun untuk perlindungan di berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan belum dapat terpenuhi. Dimana Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi melalui pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan hanya memberikan pendampingan dan pengawasan oleh pendamping agar apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka tugas pendamping siap sedia merangkul dan mejadi wadah atau tempat membantu kelompok usaha Bersama (KUBE) dimata hukum.

Pendukung (*supporting*)

Pendukung atau *supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Dimana pendukung juga merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada aplikasi yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menyokong dan mendukung masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Jadi dengan kata lain disini pendukung (*supporting*) berarti bagaimana bimbingan dan dukungan yang dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Pendukung (*supporting*) dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa jalinan komunikasi yang dimana Dinas terkait melalui pendamping memberikan dukungan komunikasi secara langsung dengan ikut terjun ke lapangan agar proses pemberdayaan itu sendiri mampu berjalan sebaik dengan baik dan sesuai target. Dukungan tersebut merupakan sikap perhatian pemerintah kepada masyarakat sebagai wujud rasa cinta terhadap masyarakatnya, tentunya dalam komunikasi itu sendiri harus timbal balik agar dalam pelaksanaan proses pemberdayaan berjalan sebaik mungkin. Hal tersebut sejalan menurut King (2017:226) bahwa dukungan sosial adalah informasi atau umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai dan diperhatikan, dihargai, dan dihormati, dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik.

Hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa pendukung (*supporting*) dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah cukup berjalan secara optimal. Dengan ikut berpartisipasi dan terjun ke lapangan merupakan salah satu bukti bahwa bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya sekedar ucapan belaka saja melainkan tindakan langsung yang dilakukan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi

Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama dilihat dari penjelasan berdasarkan indikator-indikator diatas masih ditemukan adanya faktor penghambat yang menyebabkan menurunnya efektifitas dalam pemberdayaan masyarakat melalui KUBE tersebut. Adapun faktor penghambat yang pertama adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau pertemuan kegiatan KUBE yang telah dibuat oleh Dinas Sosial. Dikarenakan sebagian masyarakat berpikiran bahwa pertemuan yang diadakan tidak penting.

Berdasarkan informasi-informasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi yaitu pertama, minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau pertemuan kegiatan KUBE yang telah dibuat oleh Dinas Sosial. Kedua, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang masih rendahnya tingkat Pendidikan anggota kelompok yang menyebabkan kemampuan untuk pengelolaan KUBE relative kurang dan tentunya minimnya pemahaman atau kemampuan anggota KUBE dalam menguasai teknologi informasi. Ketiga, kurangnya keterbukaan antar pengurus dan anggota KUBE dalam mengelola usaha bersama yang pada akhirnya mendorong terjadinya rendahnya partisipasi dan semangat kebersamaan di antara para anggota KUBE dan kurang kondusifnya iklim kerja dikelompok. Dan terakhir yang menjadi penghambat adalah persaingan usaha semakin ketat.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi penulis menarik kesimpulan yaitu merujuk pada 4 indikator pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto ((2005:93-97) yaitu: pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukung (*supporting*).

1. Pemungkinan (*enabling*) yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk menanggulangi kemiskinan sudah berjalan dengan baik dan tentunya proses pemberdayaan yang dilakukan harus secara bottom up dimana dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan dilingkungan masyarakat tersebut.
2. Penguatan (*empowering*) dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum cukup berjalan dengan baik. Dimana pelatihan yang hanya melibatkan Ketua KUBE saja, berarti Ketua itulah yang bertanggungjawab untuk memberikan pemahaman kepada anggota mereka masing-masing. Hal itu dinilai menjadi salah satu faktor tidak semua anggota KUBE mahir dalam menjalankan tugas mereka di dalam kelompok tersebut. Titik lemah dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut harus dilakukannya perbaikan oleh Dinas Sosial agar upaya mewujudkan kemandirian terhadap masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Perlindungan (*protecting*) dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum berjalan dengan baik dikarenakan perlindungan yang diberikan hanyalah perlindungan dimata hukum saja. Namun untuk perlindunga di berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan belum dapat terpenuhi.
4. Pendukung (*supporting*) dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah cukup berjalan secara optimal. Dengan ikut berpartisipasi dan terjun ke lapangan merupakan salah satu bukti bahwa bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya sekedar ucapan belaka saja melainkan tindakan langsung yang dilakukan.

Sementara itu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi masih ditemukan banyaknya faktor penghambat. Adapun yang menjadi factor penghambur dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi yaitu

1. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi atau pertemuan kegiatan KUBE yang telah dibuat oleh Dinas Sosial.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang masih rendah, disebabkan tingkat pendidikan anggota kelompok dan menyebabkan kemampuan untuk pengelolaan KUBE relatif kurang dan tentunya pemahaman atau kemampuan anggota KUBE dalam menguasai teknologi informasi belum optimal.
3. Kurangnya keterbukaan antar pengurus dan anggota KUBE dalam mengelola usaha bersama yang pada akhirnya muncul kurang pertisipasi dan semangat kebersamaan di antara para anggota KUBE, dan kurang kondusifnya iklim kerja dikelompok.
4. Persaingan usaha semakin ketat.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi, peneliti memberikan beberapa saran agar pemberdayan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat berjalan secara lebih optimal. Dalam pelaksanaa pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi diharapkan agar lebih memaksimalkan proses pemberdayaan, dimana pemberdayaan yang dilakukan harus secara bottom up dengan menggali potensi, masalah dan kebutuhan dilingkungan masyarakat tersebut.

Sebaiknya hal tersebut diiringi dengan sosialisasi dan pelatihan dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE secara menyeluruh tidak hanya melibatkan ketua KUBE melainkan juga para anggota kelompok agar masyarakat termotivasi dan berpartisipasi dalam kegiatan KUBE tersebut. Terkait dalam hal perlindungan (*protecting*) sebaiknya diberikan juga jaminan dibidang

kesehatan maupun pendidikan terhadap setiap para Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dan terkait koordinasi antara pemerintah selaku Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dengan kelurahan Bandar Utama ataupun dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masih perlu ditingkatkan lagi agar meminimalisir terjadinya faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Maka dengan itu diperlukannya pengawasan dan evaluasi terhadap program KUBE agar berjalan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- _____. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hasanurrisqi, Muhammad. dan Annisa Rahmadanita. 2018. *Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Pasern Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, Vol 3, No.1, Hal. 1-12.
- Imron, Ibrahim. Mochammad Saleh Soeaidy. Heru Ribawanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Des Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 485-491.
- King, L. A. (2017). *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mulyono, Sungkowo Edy. (2017). *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ombak
- Nasmi, Hidayat Muhammad. Dan Karjuni Dt Maani. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan*. Jurnal Dialek Publik. Vol. 3, No. 2.
- Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.
- Ramadani, Rizka. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi*. Skripsi FISIP USU.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. Tebing Tinggi Dalam 2022.